



**PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2023**



PETINGGI MANYARGADING
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA MANYARGADING
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI MANYARGADING,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2022 telah termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);

15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 28);
24. Peraturan Desa Manyargading Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Manyargading Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
DAN
PETINGGI MANYARGADING
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MANYARGADING TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Desa

a. Hasil Usaha	Rp. 150.000.000,-
b. Dana Desa	Rp. 998.156.000,-
c. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 86.819.000,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 413.990.000,-
e. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 5.000.000,-
f. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 21.600.000,-
g. Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	Rp. 0,-

Jumlah Realisasi Pendapatan **Rp. 1.675.565.000,-**

2. Realisasi Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 692.113.880,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 340.486.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 33.980.120,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 200.270.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 214.000.000,-

Jumlah Realisasi Belanja **Rp. 1.680.850.000,-**

Surplus/Defisit **Rp. (5.285.000),-**

3. Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.285.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan (a-b) **Rp. 5.285.000,-**

SILPA TAHUN BERJALAN (Bunga Bank) **Rp. 2.326.866,-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
 - 1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
 - 2. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari -
31 Desember Tahun Anggaran 2022;
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program
Lainnya Yang Masuk Ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Manyargading
pada tanggal 18 Januari 2023

PETINGGI MANYARGADING,



Diundangkan di Manyargading
Pada tanggal 20 Januari 2023

CARIK MANYARGADING,

The image shows a circular official stamp of the Carik Manyargading. The stamp contains the text "CARIK MANYARGADING" and "KABUPATEN JEPARA". A handwritten signature is written over the stamp.

MUH ABU SALIM

LEMBARAN DESA MANYARGADING TAHUN 2023 NOMOR 1

Noreg Peraturan Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara :

173 / MANYARGADING / TAHUN 2023

LAMPIRAN I PERATURAN DESA MANYARGADING

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG : Laporan Realisasi APBDes Tahun 2022

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DESA MANYARGADING

KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA

TAHUNANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
I Laporan Realisasi APBDes	1
II Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Informasi Umum	2
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	2
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	2
2 Pendapatan Asli Desa	2
3 Dana Desa	2
4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	2
5 Alokasi Dana Desa	3
6 Bantuan Keuangan Propinsi	3
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	3
8 Pendapatan Lain lain	3
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	3
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	4
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	4
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	4
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	4
16 Pembiayaan	5
17 Aset Desa	5
18 Penyertaan Modal Desa	6

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN
KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.525.565.000,00	1.525.565.000,00	0,00
Dana Desa		998.158.000,00	998.158.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		86.819.000,00	86.819.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		413.990.000,00	413.990.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	2.326.866,00	2.326.866,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.675.565.000,00	1.677.891.866,00	2.326.866,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		892.113.880,00	892.113.880,00	0,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		340.488.000,00	340.488.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		33.980.120,00	33.980.120,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		200.270.000,00	200.270.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.680.850.000,00	1.680.850.000,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(5.285.000,00)	(2.958.134,00)	(2.326.866,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH		0,00	2.326.866,00	(2.326.866,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Manyargading, 31 Desember 2022

Pada Agil

ZANUL

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aseel Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.525.565.000,00	1.525.565.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	998.156.000,00	998.156.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	86.819.000,00	86.819.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	413.990.000,00	413.990.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.326.866,00	(2.326.866,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	2.326.866,00	(2.326.866,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.675.565.000,00	1.677.891.866,00	(2.326.866,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	599.276.880,00	599.276.880,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	83.700.000,00	83.700.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	465.300.000,00	465.300.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.776.880,00	27.776.880,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	514.303.120,00	514.303.120,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	231.481.920,00	231.481.920,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	84.595.000,00	84.595.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	23.926.200,00	23.926.200,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada f	174.300.000,00	174.300.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	153.270.000,00	153.270.000,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Als	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	151.770.000,00	151.770.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.680.850.000,00	1.680.850.000,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.285.000,00)	(2.958.134,00)	(2.326.866,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00

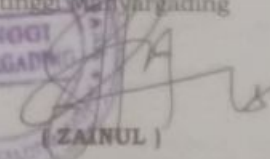
NO. URUT	NAMA	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1		1	1	1

Mengetahui, 12 Januari 2020

[Signature]

**LAPORAN REALISASI APBDES
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	150.000.000	150.000.000	-
Pendapatan Transfer				-
Dana Desa	C.3	998.156.000	998.156.000	-
Bantuan dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	C.4	86.819.000	86.819.000	-
Bantuan Dana Desa	C.5	413.990.000	413.990.000	-
Bantuan Keuangan Propinsi	C.6	5.000.000	5.000.000	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	C.7	21.600.000	21.600.000	-
Pendapatan Lain lain	C.8	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		1.675.565.000	1.675.565.000	-
BELANJA				
Belanja Penyelenggaraan pemerintah Desa	C.9 dan C15	692.113.880	692.113.880	-
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa	C.10 dan C15	340.486.000	340.486.000	-
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C.11 dan C15	33.980.120	33.980.120	-
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa	C.12 dan C15	200.270.000	200.270.000	-
Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Gawat darurat dan Mendesak Desa	C.13 dan C15	414.000.000	414.000.000	-
JUMLAH BELANJA	C.14	1.680.850.000	1.680.850.000	-
SURPLUS/(DEFISIT)		(5.285.000)	(5.285.000)	-
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	5.285.000	5.285.000	-
Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		5.285.000	5.285.000	-
SILPA TAHUN BERJALAN		1.680.850.000	1.680.850.000	-

Manyargading, 15 Januari 2023
Petinggi Manyargading

(ZAINUL)

- Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Rt : 04 Rw : 01, Desa Manyargading, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif

	51.298.673	
	51.298.673	
Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
-	-	-
-	-	-
-	-	-
150.000.000	150.000.000	-
150.000.000	150.000.000	
Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
233.662.400	233.662.400	-
233.662.400	233.662.400	-
116.831.200	116.831.200	-
584.156.000	584.156.000	-
Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
43.409.500	43.409.500	-
43.409.500	43.409.500	-
-	-	-
86.819.000	86.819.000	

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- ADD Januari	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Februari	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Maret	34.499.000	34.499.000	-
- ADD April	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Mei	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Juni	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Juli	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Agustus	34.499.000	34.499.000	-
- ADD September	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Oktober	34.499.000	34.499.000	-
- ADD November	34.499.000	34.499.000	-
- ADD Desember	34.501.000	34.501.000	-
	413.990.000	413.990.000	-

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- Banrpov KPMD

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
5.000.000	5.000.000	-
5.000.000	5.000.000	-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Jepara adalah sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
21.600.000	21.600.000	-
21.600.000	21.600.000	-

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	-	-	-
- Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	-	-	-
- Penerimaan dr bantuan perusahaan yg berlokasi diDs	-	-	-
- Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
- Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan dikas Ds.	-	-	-
- Bunga bank	-	-	-
- Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
	-	-	-

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Belanja Pegawai	599.276.880	599.276.880	-
- Belanja Barang dan Jasa	91.337.000	91.337.000	-
- Belanja Modal	1.500.000	1.500.000	-
	692.113.880	692.113.880	-

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Belanja Barang dan Jasa	340.486.000	340.486.000	-
- Belanja Modal	-	-	-
	340.486.000	340.486.000	-

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Belanja Barang dan Jasa	33.980.120	33.980.120	-
- Belanja Modal	-	-	-
	33.980.120	33.980.120	-

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Terdiri dari :			
- Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
	48.500.000	48.500.000	-
- Belanja Modal	151.770.000	151.770.000	-
	200.270.000	200.270.000	-
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Selama tahun anggaran 2021, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut			
- Belanja Tidak Terduga	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
	414.000.000	414.000.000	-
	414.000.000	414.000.000	-
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :			
Belanja Pegawai			
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
	83.700.000	83.700.000	-
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	465.300.000	465.300.000	-
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.776.880	27.776.880	-
- Tunjangan BPD	22.500.000	22.500.000	-
	599.276.880	599.276.880	-
Belanja Barang dan Jasa			
- Belanja Barang Perlengkapan Kantor	235.530.680	235.530.680	-
- Belanja Jasa Honorarium	77.525.000	77.525.000	-
- Belanja Operasional Aparatur Desa	-	-	-
- Belanja Jasa Sewa	3.900.000	3.900.000	-
- Belanja Operasional Perkantoran	23.047.440	23.047.440	-
- Belanja Pemeliharaan	-	-	-
- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada masyarakat	588.300.000	588.300.000	-
	928.303.120	928.303.120	-
Belanja Modal			
- Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	1.500.000	1.500.000	-
- Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
- Belanja Modal Jalan	-	-	-
- Belanja Modal Jembatan	-	-	-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	151.770.000	151.770.000	-
- Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
- Belanja Modal lainnya	-	-	-
	153.270.000	153.270.000	-
5. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)			
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
	659.528.880	659.528.880	-
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.500.000	1.500.000	-
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.080.000	4.080.000	-
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.005.000	27.005.000	-
- Sub Bidang Pertanahan	-	-	-
	692.113.880	692.113.880	-
Bidang Pembangunan Desa			
- Sub Bidang Pendidikan	11.911.000	11.911.000	-
- Sub Bidang Kesehatan	208.575.000	208.575.000	-
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-
- Sub Bidang Kawasan Permukiman	120.000.000	120.000.000	-

- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	-	-	-
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
- Sub Bidang Pariwisata	-	-	-
	340.486.000	340.486.000	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2.100.000	2.100.000	-
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-	-	-
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3.600.000	3.600.000	-
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.280.120	28.280.120	-
	33.980.120	33.980.120	-
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	200.270.000	200.270.000	-
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	-
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	-
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
	200.270.000	200.270.000	-
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-
- Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	414.000.000	414.000.000	-
	414.000.000	414.000.000	-
16. Pembiayaan			
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
- Penerimaan Pembiayaan	5.285.000	5.285.000	-
- Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	5.285.000	5.285.000	-
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	5.285.000	5.285.000	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
	5.285.000	5.285.000	-
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	-	-	-
	-	-	-
17. Aset Desa			
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,			
	2022	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
- Tanah	16.031.100.000	16.031.100.000	-
- Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	71.050.000	69.550.000	1.500.000
- Kendaraan	30.000.000	30.000.000	-
- Gedung dan Bangunan	363.853.000	363.853.000	-
- Jalan	1.182.266.000	1.182.266.000	-
- Jembatan	681.087.000	681.087.000	-
- Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	798.248.000	646.478.000	151.770.000
- Jaringan/Instalasi	468.103.000	468.103.000	-
- Aset Tetap lainnya	1.500.000	1.500.000	-
- Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	19.627.207.000	19.473.937.000	153.270.000

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyataan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

- BUMDes KUSUMA JAYA

2022	2021	Penambahan/ (Pengurangan)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Mariyadings, 16 Januari 2023
Petinggi Maryadings


(ZAINUL)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANYARGADING
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.1.2.99.	Lain-lain Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.525.565.000,00	1.525.565.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	998.156.000,00	998.156.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	998.156.000,00	998.156.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	86.819.000,00	86.819.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	86.819.000,00	86.819.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	413.990.000,00	413.990.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	413.990.000,00	413.990.000,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.2.4.99.	Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	2.326.866,00	2.326.866,00
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	2.326.866,00	2.326.866,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	2.326.866,00	(2.326.866,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.675.565.000,00	1.677.891.866,00	2.326.866,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	692.113.880,00	692.113.880,00	0,00
1.1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Sifat,	659.528.880,00	659.528.880,00	0,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	345.300.000,00	345.300.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	345.300.000,00	345.300.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	345.300.000,00	345.300.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	340.800.000,00	340.800.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.776.880,00	27.776.880,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	27.776.880,00	27.776.880,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.776.880,00	27.776.880,00	0,00
1.1.3	5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	4.656.960,00	4.656.960,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	23.119.920,00	23.119.920,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	29.215.000,00	29.215.000,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.215.000,00	29.215.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Mekan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	437.000,00	437.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	437.000,00	437.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	437.000,00	437.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	77.000,00	77.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	360.000,00	360.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.393.800,00	4.393.800,00	0,00
1.1.7	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.393.800,00	4.393.800,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	17.206.200,00	17.206.200,00	0,00
1.1.7	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	4.966.200,00	4.966.200,00	0,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.91	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.1.92	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.02	5.1.2.00	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
1.2		Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.2.1	5.2.	Belanja Modal	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.2.1	5.2.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.2.1	5.2.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.3		Sub Bidang Pengelolaan Administrasi	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	155.000,00	155.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	185.000,00	185.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kor	600.000,00	600.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
1.4		Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Desa	27.005.000,00	27.005.000,00	0,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20.285.000,00	20.285.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.285.000,00	20.285.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.285.000,00	20.285.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	285.000,00	285.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	700.000,00	700.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	240.485.000,00	240.485.000,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	11.911.000,00	11.911.000,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana/Alat Peraga	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
2.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
2.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
2.1.6	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00

KODE PER		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.10	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepi	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.10	5.2.1.04	Belanja Bantuan Operasional/Masyarakat Mekan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	208.575.000,00	208.575.000,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD)/Polindes Milik Desa (obat, insentif	32.845.000,00	32.845.000,00	0,00
2.2.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.845.000,00	32.845.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	27.520.000,00	27.520.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Poyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,Insentif	77.130.000,00	77.130.000,00	0,00
2.2.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	77.130.000,00	77.130.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	58.130.000,00	58.130.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	40.920.000,00	40.920.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	18.210.000,00	18.210.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Lintuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
2.2.3	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.1.05	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.3	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00
2.2.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	71.300.000,00	71.300.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	45.050.000,00	45.050.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
2.4.1	5.2.1	Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.4.1	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.980.120,00</u>	<u>33.980.120,00</u>	<u>0,00</u>
3.1		<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>	<u>2.100.000,00</u>	<u>2.100.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.1.90		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
3.1.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>3.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.3.6	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>28.280.120,00</u>	<u>28.280.120,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.3		Pembinaan PKK	18.280.120,00	18.280.120,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.280.120,00	18.280.120,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.280.120,00	18.280.120,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	230.120,00	230.120,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	17.490.000,00	17.490.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	560.000,00	560.000,00	0,00
3.4.90		Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan;	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>200.270.000,00</u>	<u>200.270.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>200.270.000,00</u>	<u>200.270.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.2.4		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	151.770.000,00	151.770.000,00	0,00
4.2.4	5.3.	Belanja Modal	151.770.000,00	151.770.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lim	151.770.000,00	151.770.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Upat	48.830.000,00	48.830.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Baha	99.040.000,00	99.040.000,00	0,00
4.2.4	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dli - Sewi	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
4.2.91		Pelatihan kelompok tani	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.2.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.91	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
4.2.91	5.2.1.06	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spenduk	200.000,00	200.000,00	0,00
4.2.93		Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
4.2.93	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kopi	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
4.2.93	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.680.850.000,00	1.680.850.000,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(5.285.000,00)	(2.958.134,00)	(2.326.866,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH			0,00	2.326.866,00	(2.326.866,00)

Manyaragading, 31 Desember 2022



Lampiran III Peraturan Desa Manyargading
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tentang : Laporan Pertanggung jawaban
 Realisasi Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2022

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

URAIAN	TAHUN 2022 Rp.	TAHUN 2021 Rp.
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa	0	0
b. Rekening Kas Desa	2.326.886	7.084.301
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah	0	0
b. Piutang Sewa Gedung	0	0
3. Persediaan		
b. Benda Pos dan Materai	0	0
b. Persediaan Alat Tulis Kantor	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	2.326.886	7.084.301
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
a. Penyertaan Modal PEMDesa	0	0
2. Aset Tetap		
a. Tanah	16.031.100.000	16.031.100.000
b. Peralatan dan Mesin	101.050.000	99.550.000
c. Gedung dan Bangunan	363.853.000	363.853.000
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.129.704.000	2.977.934.000
e. Aset Tetap Lainnya	1.500.000	1.500.000
3. Dana Cadangan		
a. Dana Cadangan	0	0
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	19.627.207.000	19.473.937.000
JUMLAH ASET (A + B)	19.629.533.886	19.481.021.301
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	19.629.533.886	19.481.021.301

Petung Manyargading

 (ZAINUL)

Lampiran IV Peraturan Desa Manyargading
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tentang : Laporan Pertanggung Jawaban
 Realisasi Pelaksanaan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun Anggaran 2022

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2022
 Desa : Manyargading
 Kecamatan : Kalinyamatan
 Kabupaten : Jepara

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp. 0,-
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp. 0,-
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp. 0,-
1.	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total (4)							Rp. 0,-
Total Jenis Kegiatan (1 s/d 4)							Rp. 0,-

Petinggi Manyargading

 (ZAINUL)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MANYARGADING KEC. KALINYAMATAN KAB. JEPARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING
NOMOR 142 /1 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MANYARGADING TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang : a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2022, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 28);
24. Peraturan Desa Manyargading Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Manyargading Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Manyargading Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Manyargading Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Manyargading.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manyargading
Pada tanggal 16 Januari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



(AHMAD KHOLIL)

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANYARGADING

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Balai Desa Manyargading Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara telah mengadakan rapat bersama antara Badan Permasyarakatan Desa, Petinggi dan Perangkat Desa Manyargading.

Dalam rapat tersebut telah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2022 dan diperoleh kata sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2022 tersebut menjadi Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Desa

a. Hasil Usaha	Rp. 150.000.000,-
b. Dana Desa	Rp. 998.156.000,-
c. Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 86.819.000,-
d. Alokasi Dana Desa	Rp. 413.990.000,-
e. Bantuan Keuangan Propinsi	Rp. 5.000.000,-
f. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 21.600.000,-
g. Pendapatan Lain-lain	Rp. 0,-

Jumlah Realisasi Pendapatan

Rp. 1.675.565.000,-

2. Realisasi Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 692.113.880,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 340.486.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 33.980.120,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 200.270.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 214.000.000,-

Jumlah Realisasi Belanja

Rp. 1.680.850.000,-

Surplus/Defisit

Rp. (5.285.000),-

3. Realisasi Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 5.285.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-

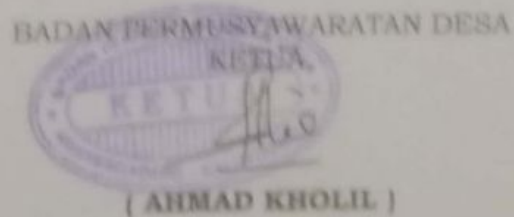
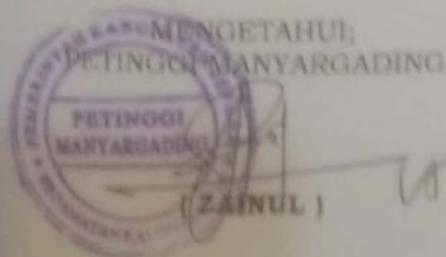
Selisih Pembiayaan (a-b)

Rp. 5.285.000,-

SILPA TAHUN BERJALAN (Bunga Bank)

Rp. 2.326.866,-

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manyargading Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Tempat : Balai Desa Manyargading
Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD KHOLIL	KETUA	1
2	SYUKUR	WAKIL KETUA	2
3	AKHMAD BAHRUDDIN	SEKRETARIS	3
4	MUKHAMMAD ULIL AIDI	ANGGOTA	4
5	LATIFAH HANUM	ANGGOTA	5

BADAN PERMUSYAWATAN DESA (BPD)

KETUA

(AHMAD KHOLIL)



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN KALINYAMATAN
DESA MANYARGADING

Sekretariat : Jl. Balai Desa No. 5 Telp. 0291 7520307 - Kode Pos 59467

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Tempat : Balai Desa Manvargading
Acara : Musyawarah Desa membahas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Zaimul	Petinggi	1. [Signature]
2	Muh. Ali Salim	Carik	2. [Signature]
3	Ahmad Kholil	BPD	3. [Signature]
4	Shukur	BPD	4. [Signature]
5	Lutfah Hanum		5. [Signature]
6	SUTIRNO	PRK	6. [Signature]
7	Kamandi		7. [Signature]
8	MUHAMMAD		8. [Signature]
9	ISMAINI YUSUF	PO	9. [Signature]
10	Muhammad Izzah		10. [Signature]
11	MUHTAROM		11. [Signature]
12	Firdaus Taufiq	Perangkat	12. [Signature]
13	Sri Wahyuninggit		13. [Signature]
14	Ahmad Bahri		14. [Signature]
15	Liliman Hakim		15. [Signature]
16	MUR ROSYID		16. [Signature]
17	MASHADI		17. [Signature]
18	Abdul Karim		18. [Signature]
19	Ahmad Ulil Pidi		19. [Signature]
20			20. [Signature]
21			21. [Signature]
22			22. [Signature]
23			23. [Signature]
24			24. [Signature]
25			25. [Signature]

